

Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Aceh Utara

Wisnu Rahdiansyah Nst, M. Reza Fahlevi

Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Author: rahdiansyahwisnu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat memiliki kontribusi untuk pengentasan kemiskinan pada masyarakat. Peran pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun norma dan jaringan sosial antara masyarakat memainkan peranan sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Peran pemerintah, modal sosial, kesejahteraan, dan masyarakat kurang mampu

ABSTRACT

This study examines the influence of the role of government and social capital on the welfare of the underprivileged in North Aceh Regency. This research was conducted in North Aceh District, Aceh Province, Indonesia. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The results of the study conclude that social capital owned by the community, both from the government and from the community, has a contribution to poverty alleviation in the community. The role of the North Aceh Regency government does not have a direct influence on the welfare of the community. However, norms and social networks between communities play a very important role in achieving community welfare.

Keywords: *The role of government, social capital, welfare, and the underprivileged*

Pendahuluan

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain dengan merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tidak sedikit program yang telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat yang kurang mampu (antara lain melalui pemberian bantuan dana), membangun infrastruktur, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain. Diakui atau tidak, selama ini pendekatan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi masyarakat yang kurang mampu, baik di tingkat Gampong, Kecamatan maupun lokal, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah masyarakat yang kurang mampu sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan harian.

Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah, umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi dan semacamnya. Masalah masyarakat yang kurang mampu telah lama menjadi ganjalan bagi sebuah proses pembangunan perekonomian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil ditingkatkan, ternyata tidak secara otomatis dibarengi dengan semakin membaiknya pemerataan pendapatan. Kuznet (1955) berkeyakinan bahwa proses pembangunan ekonomi akan menjadi timpang pada awal pembangunan ekonomi, serta menjadi semakin merata sejalan dengan proses pembangunan yang menghasikan pembentukan dan pemerataan yang semakin baik.

Masyarakat yang kurang mampu merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk kurang mampu dunia. Karakteristik masyarakat yang kurang mampu bersifat multidimensional menuntut langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga yang ada di Indonesia secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan masyarakat yang kurang mampu sistematis, komprehensif, dan terpadu memerlukan koordinasi yang harmonis yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah kabupaten aceh lainnya dengan arus mobilitas penduduk dari penjuru daerah melalui pelabuhan dan bandara menetap di suatu wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menjadi strategis dan penting untuk dikaji, dengan tujuan agar dapat dipetakan pola dan dinamika persaingan dalam mendapatkan sumber daya produksi yang terbatas, melalui persaingan antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal. Pemetaan tentang potensi modal sosial juga diharapkan menjadi bermanfaat pada masa yang akan datang, sebagai parameter untuk melihat apakah kebersamaan modal sosial masyarakat yang kurang mampu menjadi semakin melemah, atau menguat bersama dengan dinamika tingkat persaingan antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wegner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “ The Law of Expanding State Expenditure”. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (Organic Theory Of The State) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Portes, 1998: 1).

Kepercayaan dalam modal sosial merupakan suatu bentuk hasrat atau keinginan dalam mengambil resiko pada hubungan sosialnya didasari atas persamaan keyakinan berbuat sama yang diharapkan dan senantiasa bertindak saling mendukung tanpa merugikan diri dan kelompoknya (Putnam,1995). Begitu juga Pretty dan Ward (2001), berpendapat bahwa terdapat dua macam kepercayaan pada modal sosial: kepercayaan terhadap individu atau seseorang yang kita mengenalnya, dan kepercayaan terhadap orang atau individu yang kita tidak tahu, namun akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur sosial itu sendiri. Saling percaya terhadap yang lain dalam sebuah komunitas memiliki harapan yang lebih untuk dapat berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan (Liu et. Al (2014); Krishhna dan Uphoff, (1999); Yunus et.all, (2020, 2021); Jones (2005, 2010); Pretty dan Ward (2001).

Untuk melihat kerangka konseptual untuk menganalisis pengaruh modal sosial pada kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu diukur melalui pengeluaran perkapita rumah

tangga sama halnya dengan modal lainnya. Modal Sosial bersama-sama dengan modal manusia, modal finansial, dan modal lainnya digunakan dalam kegiatan produksi di rumah.

Landasan Konseptual

Modal Sosial

Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai; “*Features Of Social Organization Such As Networks, Norms, And Social Trust That Facilitate Coordination And Cooperation For Mutual Benefit*”. (Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama). Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *Social Networks* dan *Etworks of Civic Engagement*, jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (Hasil Tambahan).

Bourdieu berargumen, mustahil memahami dunia sosial tanpa mengetahui peran modal dalam segala bentuknya, dan tidak sekadar dalam satu bentuk yang diakui oleh teori ekonomi. Karya bourdieu tentang modal sosial nyaris diabaikan oleh Coleman dan Putnam, maupun oleh ilmuwan sosial lainnya. Hal ini karena Bourdieu tidak melihat sisi gelap modal sosial. Kendati perhatiannya terhadap ketimpangan dan kekuasaan adalah koreksi yang sangat berguna bagi Putnam dan Coleman, penitik beratan satu sisi pada manfaat modal sosial bagi para pemiliknya diyakini sebagai satu kelemahan. Bourdieu melihat modal sosial yang terkesan sedikit kuno dan individualistis.

Kemiskinan

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan petani. Namun demikian sampai saat ini petani belum dapat keluar sepenuhnya dari belenggu kemiskinan (Saifuddin, et.all 2015; 2017). Menurut akar penyebab yang melatar belakanginya, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul

sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya, faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian, sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turunturun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar. Tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan modal sosial, dan *Community Development* Budhi Cahyono (2014).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di empat belas Gampong di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena, 1). wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah masyarakat yang kurang mampu terbesar dibandingkan dengan delapan Gampong lainnya, masyarakat yang kurang mampu untuk ditingkat Gampong, Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah masyarakat yang kurang mampu paling tinggi di bandingkan dengan Kabupaten lainnya sejumlah 10.944 masyarakat yang kurang mampu menjadikan Kabupaten Aceh Utara sebagai Kabupaten yang memiliki masyarakat yang kurang mampu dan terbanyak, 2). Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah sumber daya alamnya yang lebih dengan jumlah masyarakat yang kurang mampu penduduknya cukup heterogen dengan bentangan wilayah yang cukup luas.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yang lebih menonjolkan proses makna dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Moleong

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan (Herdiansyah, 2011: 9).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui dan memahami realitas yang terjadi di lokasi penelitian. Kemudian dengan wawancara mendalam peneliti dapat menggali lebih dalam tentang data yang dibutuhkan sehingga makna yang terdapat dibalik suatu kejadian tersebut dapat ditangkap. Dengan wawancara mendalam, peneliti mampu melakukan empati yaitu mampu memahami apa yang dipahami informan (Sugiono, 2013). Sedangkan Data dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan atau website yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penduduk di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 berjumlah 772.961 jiwa dengan kepadatan penduduk 184 jiwa/km² sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara ini termasuk padat. Dengan jumlah penduduk tersebut Kecamatan Dewantara menjadi wilayah terpadat dengan rata-rata 1.202 jiwa penghuni tiap 1 km². Tingkat kepadatan ini terus bertambah tiap tahunnya yang disebabkan jumlah kelahiran dan migrasi masuk. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Paya Bakong yang tiap kilo meter persegi hanya dihuni oleh 33/KM.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Sawang	36.502
2	Nisam	18.223
3	Nisam Antara	12.981
4	Banda Baro	7.841
5	Kuta makmur	23.631
6	Simpang Keramat	9.330
7	Syamtalira Bayu	20.138
8	Geureudong pase	4.812
9	Meurah Mulia	18.908
10	Matang Kuli	17.766
11	Paya bakong	13.614
12	Pirak Timu	7.952

13	Cot Girek	19.838
14	Tanah Jambo Aye	42.794
15	Langkahan	22.438
16	Seunudon	24.822
17	Baktiya	35.437
18	Baktiya Barat	18.328
19	Lhoksukon	48.080
20	Tanah Luas	23.897
21	Nibong	9.778
22	Samudera	26.538
23	Syamtalira Aron	17.798
24	Tanah pasir	8.915
25	Lapang	8.538

Sumber: BPS Pada tahun 2020

Kontribusi dan Peran Pemerintah Dalam Modal Sosial Program Penanggulangan Masyarakat Yang Kurang Mampu

Kontribusi dan peran modal sosial dalam program penanggulangan masyarakat yang kurang mampu senantiasa bervariasi tergantung kesungguhan pelaksana program dalam mengikuti sertakan hal tersebut dalam setiap tahapan, Dalam program penanggulangan masyarakat yang kurang mampu yang dilakukan lewat PNPM Perkotaan, terdapat siklus atau tahapan yang harus dilalui. Berikut ini akan dijelaskan peran modal sosial dan kontribusinya dalam setiap siklus atau tahapan sebagai berikut ini:

1. Refleksi kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai objek, masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya, masalah dirumuskan oleh orang luar.
2. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak kelompok masyarakat, baik yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM juga menggunakan pendekatan kelompok, maka PNPM akan banyak membentuk KSM, meskipun tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada.
3. Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Langsung Masyarakat melalui PNPM yang telah di terima LKM Sejahtera di setiap Gam-

pong sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta rupiah) yang telah di salurkan mulai tahun 2014 sampai tahun 2019.

4. Kemitraan (Channeling), Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat.

Sementara itu, jaringan sosial dan kelembagaan yang dimiliki masyarakat yang kurang mampu Kabupaten Aceh Utara juga sudah mulai terbangun lama di masyarakat. Jaringan sosial ini selalu diperlukan dalam setiap aspek kehidupan bersama, misalnya di bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan dan keamanan lingkungan. Jaringan sosial dan kelembagaan di masyarakat Kabupaten Aceh Utara tumbuh seiring dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Jaringan dan kelembagaan tersebut bersifat non-formal atau kultural. Sedangkan jaringan dan kelembagaan yang bersifat formal mengikuti pola dan sistem pemerintahan di mana suatu program membutuhkan pembentukan lembaga baru.

Penerima raskin di setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 200 KK. Jatah beras per bulan 15 kg/KK; penerima Bantuan Siswa Miskin sejumlah 56 KK dengan rincian distribusi per tahun untuk siswa SD Rp 425.000,- SMP Rp575.000,- dan SMA Rp700.000,-; penerimaan Bantuan Tunai Langsung sebanyak 200 KK sebesar Rp300.000,- diberikan tiga bulan sekali, program PNPM sebanyak 114 PNPM Gampong dengan jumlah peserta 17 orang/KK dari masyarakat miskin penerima manfaat. Terlihat proses evaluasi link sebagai berikut kerja sama antara pembagian pemberdayaan masyarakat dengan Ibu-ibu PKK di setiap Gampong, kerja sama pengelolaan BSM antar keluarga dan masyarakat penerima manfaat, partisipasi pada pemberian informasi, kerja sama antara peserta dan pelatih ket-erampilam dalam pembentukan kelompok.

Keberadaan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sangat besar peranannya. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya siklus PNPM yang mengkonsepsikan pentingnya partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dimiliki masyarakat. Salah satu peran modal sosial dalam program tersebut adalah tumbuhnya kepercayaan (Trust) antar para pelaku program, pembagian tugas antar bidang dan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan. Hal

tersebut dapat diamati melalui beragam kegiatan yang tercakup dalam tridaya, yaitu bidang pembangunan infra struktur lingkungan, bidang sosial dan bidang ekonomi.

Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Kepercayaan Modal Sosial di Kabupaten Aceh Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Aceh Utara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan modal sosial khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Dengan besarnya koefisien estimate dari peran pemerintah terhadap kepercayaan modal sosial atau trust. Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sejumlah 20.000 rumah dengan jumlah bantuan Rp.350.000,00/KK/enam bulan pembangunan berjalan. Pembangunan prasana air bersih dan sumur resapan didistribusikan kepada 5 RW yang membutuhkan penampungan air. Partisipasi antara penerima manfaat, relawan dan pihak pemerintah pada tahap persiapan sampai tahap penyelesaian pembangunan.

Koefisien tersebut bertanda positif yang berarti bahwa semakin ditingkatkan peran pemerintah maka semakin besar pula penguatan trust atau kepercayaan modal sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Karakteristik modal sosial masyarakat Kabupaten Aceh Utara sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum program PNPM dilaksanakan. Karakteristik modal sosial ini meliputi kepercayaan (Trust), jaringan yang telah modal sosial ini berkontribusi positif dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang menekankan keikutsertaan masyarakat dalam beragam aktivitasnya.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk khususnya di Kabupaten Aceh Utara baik di Gampong maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tidak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar. Konsep modal sosial (*Social Capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia, karena dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Salah satu unsur penting dari modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dari premis ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan-kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dan sisi material tapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain secara bersama-sama. Bentuk modal sosial ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip universalisme tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemanusiaan dan kemanusiaan, terbuka dan mandiri. Bahwasanya nilai nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, atau kelompok melalui masyarakat tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemabahasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut; Pengentasan kemiskinan pada masyarakat kota dilakukan tidak saja dari porgram pemerintah tetapi juga melalui asosiasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Keduanya memiliki link dan *trust* pada pelaksanaannya agar terjalin *networking* yang lebih luas. Sehubungan dengan itu, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat memiliki kontribusi untuk pengentasan kemiskinan pada masyarakat.

Peran pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Namun norma dan jaringan sosial antara masyarakat memainkan peranan sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badaruddin 2005. *Modal Sosial (Social Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Budhi Cahyono (2014), Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo, *EKOBIS* Vol.15, No.1, Januari 2014: 2 1 – 16
- Field, John, 2011, *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D.W, Calantone, R. J, 2014. Common beliefs and reality about partial least squares: Comments on Rönkkö & Evermann 2013. *Organizational Research Methods*, 17 (2), pp 182–209.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pretty, J., Ward, H. 2001. *Social Capital and the Environment*. World Development Vol. 29, No. 2. Pp 163-210.
- Putnam, R.D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*: Vol. 25. No. 12. Pp 1-8.
- Supriatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Saifuddin, Suadi, Fadli, Muhammad Bin Abubakar, 2015. Local Economic Empowerment of the Ex- Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) and Conflict Victims through Palm Oil Plantation Aid Program In East Aceh. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 5, No. 10 (1). Pp. 119-124.
- Saifuddin, Suadi, Suryadi, Fadli, 2017. Integration of Oil Palm and Cattle for Post Conflict Sustainable Development. . *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 7, No. 6. Pp. 116-121
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Yunus, Saifuddin. Zainal, Suadi. Jalil, Fadli. Sari, Cut Maya Aprita. 2020. Correlation of Social Capital and Poverty Farmers In Aceh. *Humanities dan Social Sciences Reviews*. Vol 8, No 1, pp 20-26. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.813>.
- Yunus, Saifuddin. Zainal, Suadi. Jalil, Fadli. 2020. Social Network, Trust, and Collective Action of Aceh Farmers in Increasing Welfare. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. Vol 24, No 2. Pp 184-192. Doi: 10.37200/IJPR/V24SP2/PR201299.
- Yunus, Saifuddin. Zainal, Suadi. Jalil, Fadli, Khalsiah. 2020. What Makes Farmers in ACEH Still in Poverty? *Talent Development & Excellence*. Vol 12, No. 1. pp 2121-2129.
- Yunus, Saifuddin, Zainal, Suadi, Jalil, Fadli. 2021. *Modal Sosial, Kemiskinan dan Pembangunan*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.